

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1 Meningkatnya Produktivitas Badan Usaha Milik Negara di Bidang Infrastruktur dan Logistik</i>					
1.1	Indikator 1.1 Jumlah realisasi belanja modal BUMN Infrastruktur dan Logistik	Triliun Rupiah	26,72	4,96	4.49	90.5%
1.2	Indikator 1.2 Presentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik	%	60	15	15%	100%
II	<i>Sasaran Program 2 Tersedianya Skema Pembiayaan Inovatif</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah	%	50	-	100%	100%
III	<i>Sasaran Program 3 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik, dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda	%	80	20	20	100%

3.2	Indikator 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerjasama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah	%	80	20	20	100%
3.3	Indikator 3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah	%	80	20	20	100%
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik	Indeks	3 dari 4	-	-	100%
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputy Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik	%	92	20	20	100%

Kinerja Asisten Deputy Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Produktivitas Badan Usaha Milik Negara di Bidang Infrastruktur dan Logistik

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produktivitas Badan Usaha Milik Negara di Bidang Infrastruktur dan Logistik yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik
2. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Jumlah Realisasi Latar Belakang
Belanja Modal
BUMN Bidang
Infrastruktur dan
Logistik

Belanja modal (capital expenditure/capex) merupakan indikator penting untuk menilai komitmen investasi BUMN dalam memperluas kapasitas usaha dan mendukung agenda industrialisasi nasional. Tingkat realisasi capex mencerminkan efektivitas eksekusi program kerja dan keseriusan BUMN dalam berkontribusi terhadap prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran atas persentase realisasi belanja modal menjadi relevan sebagai indikator kinerja utama bagi koordinasi Kemenko Perekonomian dalam mendorong akselerasi pertumbuhan sektor industri prioritas.

Upaya Pengembangan Usaha BUMN membutuhkan belanja modal (capex) yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong hal tersebut, dilakukan koordinasi dan monitoring pada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik sehingga target persentase realisasi belanja modal tahun 2026 sebesar Rp26.717,8 Milyar berdasarkan kondisi terakhir yang kami pantau pada realisasi Capex BUMN s.d. Triwulan III 2025.

BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik yang dikoordinasikan belanja modalnya yaitu pada BUMN yang memiliki kriteria di antaranya: merupakan BUMN dengan nilai aset besar dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*), atau BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, serta di bawah koordinasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik yakni:

1. Bidang Infrastruktur
 - a. PT Utama Karya (Target Rp6.934,6 M)
 - b. PT Jasa Marga (Target Rp6.884,3 M)
2. Bidang Logistik
 - a. PT Pelabuhan Indonesia (Target Rp5.449,6 M)
 - b. PT Kereta Api Indonesia (Target Rp7.449,3 M)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar Rp26,72 Triliun. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada *cascading* dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun target triwulan sebesar Rp4.96 Triliun.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Belanja Modal (Capex) BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar Rp 4.49 Triliun dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1	Realisasi	Triliun Rupiah	4.96	4.49	90.5%
Jumlah	Modal				
Belanja	Bidang				
BUMN					

Infrastruktur dan Logistik				
----------------------------	--	--	--	--

Rincian dari realisasi belanja modal di TW I 2026 adalah sebagai berikut:

1. PT Utama Karya: Rp 1.369 Milyar
2. PT Jasa Marga: Rp 1.320 Milyar
3. PT Pelabuhan Indonesia: Rp 1.249 Milyar
4. PT Kereta Api Indonesia: Rp 551 Milyar

Realisasi belanja modal pada Triwulan I 2026 dengan nilai total sebesar Rp 4.490 Milyar ini berada sedikit dibawah target dari yang telah ditetapkan. Hal ini diakibatkan karena adanya penataan ulang yang dilakukan oleh Danantara yang menyebabkan terhambatnya persetujuan anggaran-anggaran besar BUMN yang diberikan untuk pelaksanaan belanja modal, baik secara umum maupun untuk bidang Infrastruktur dan Logistik. Selain itu, hal ini juga sedikit dipengaruhi oleh pergeseran fokus pembangunan Pemerintah dari pembangunan infrastruktur secara masif menjadi pembangunan infrastruktur untuk program-program penting yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Hal ini berdampak kepada turunnya permintaan pembangunan modal oleh BUMN yang tercermin pada realisasi TW I 2026 ini. Terakhir, hal yang juga berdampak kepada realisasi belanja modal adalah ketidakpastian perekonomian yang dimulai pada TW I ini, khususnya terkait nilai kurs mata asing dan suku bunga. Hal ini menyebabkan BUMN lebih bersifat *wait and see* dan menyiapkan langkah strategis yang tepat untuk menyikapi kondisi-kondisi ini.

Berdasarkan dokumen perencanaan strategis BUMN tahun 2026, belanja modal difokuskan pada pembangunan terminal pelabuhan strategis, jalan tol, gedung-gedung di IKN, serta pengadaan alat produksi seperti kapal. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi pertumbuhan bisnis konstruksi, industri besi baja, dan sektor terkait lainnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)

1.	Koordinasi rencana belanja modal (<i>Capex</i>) tahun 2026 dengan BP BUMN	Terlaksana	Menghadiri Rapat Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN pada tanggal 21 Januari 2026
2	Penetapan Kriteria BUMN yang dilakukan <i>monitoring</i> terkait komponen target realisasi belanja modal	Terlaksana	Melakukan penyempurnaan Konsep Manual IKU dan Rencana Aksi Tahun 2026 pada tanggal 17 Maret 2026
3	Reviu penetapan belanja modal BUMN berdasarkan kebijakan BP BUMN	Terlaksana	

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yakni melalui efisiensi yang telah dilakukan secara terpusat di lingkungan Kemenko Perekonomian sejak awal tahun. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan pendetailan dari penghematan yang dilakukan

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum sesuainya antara jadwal pelaporan kinerja BUMN dengan kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan laporan kinerja ini, sehingga data dan informasi dari BUMN belum sepenuhnya tersedia karena masih dalam tahap konsolidasi. Spesifik terkait Lapkin TW I, hal ini masih terselamatkan karena dikumpulkan setelah TW II berakhir, namun untuk periode selanjutnya, hal ini diyakini akan menjadi masalah.
2. Masih kompleksnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait.
3. Kondisi ekonomi yang kurang baik membuat BUMN hanya melakukan investasi pada komponen belanja modal yang betul- betul strategis ataupun dapat memberikan hasil yang lebih pasti

Berdasarkan kendala–kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meng-update data dan informasi secara berkala guna mendukung pemantauan berkelanjutan atas pencapaian kinerja BUMN.

2. Meningkatkan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.
3. Mendorong BUMN untuk melakukan pemilihan proyek yang berpotensi serta melakukan komitmen belanja modal

1.2. Presentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik

Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas usaha yang seluruh atau sebagian besar kepemilikan modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan secara langsung, atau yang memberikan hak khusus kepada negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

BUMN memegang peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional melalui berbagai kontribusi terhadap penerimaan negara, termasuk dalam bentuk pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta fungsi-fungsi ekonomi lainnya. Selain mengedepankan tujuan komersial, BUMN juga menjalankan misi pelayanan publik dengan menyediakan barang dan jasa bagi kepentingan umum, membuka bidang usaha yang belum dapat dijalankan oleh sektor swasta, serta membina pelaku usaha kecil melalui program kemitraan.

Pengembangan usaha BUMN dilaksanakan melalui berbagai strategi, antara lain diversifikasi dan ekspansi usaha, restrukturisasi dan revitalisasi entitas, serta peningkatan sinergi antar-BUMN. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan penambahan pendapatan nasional agregatif atau pertumbuhan output dalam periode tertentu yang meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan indikator seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Dalam hal ini, peran BUMN sangat strategis sebagai instrumen negara dalam mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Selaras dengan peran tersebut, BUMN juga menerima penugasan dari pemerintah untuk menjalankan berbagai program strategis nasional, khususnya di bidang infrastruktur dan logistik. Penugasan ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan nasional, memperkuat ketahanan sektor-sektor vital, serta mendukung penyediaan barang dan jasa publik yang belum dapat sepenuhnya dijalankan oleh swasta. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan penugasan ini, diperlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemantauan yang intensif oleh Kemenko Perekonomian agar pelaksanaannya berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik dihitung dengan:

Persentase Realisasi Pelaksanaan Penugasan

$$= \frac{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diselesaikan}}{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 realisasi penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik sebesar 60%. Penetapan target tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJPN, dan Program Prioritas. Adapun target realisasi penyelesaian penugasan tersebut pada triwulan I adalah sebesar 15%. Pada tahun 2026, terdapat beberapa proyek atau program penting terkait infrastruktur dan logistik yakni:

- a. Menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Ratas Penanganan dan Pemulihan Bencana Sumatera (14 Desember 2025), Pemerintah dan BUMN bersinergi dalam pembangunan hunian sementara (hunlara) dan hunian tetap (hunlap) di daerah pascabencana. Dalam hal ini, Danantara menugaskan BUMN Karya untuk melaksanakan pembangunan tersebut melalui skema kontrak kerja dengan Kementerian PU. Indikator penyelesaian penugasan ini adalah terbangunnya hunian sesuai kontrak. Dalam hal ini, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik akan melakukan pendampingan dan pemantauan untuk proses penyelesaian pembangunan hunian dimaksud.
- b. Penyelesaian pembayaran *reimbursement* kepada PT KAI, PT PELNI, dan PT ASDP atas penugasan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri/Kepala Badan yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara tanggal 28 Oktober 2025 tentang Penugasan kepada BUMN Sektor Transportasi dalam Pemberian Diskon Tarif Transportasi untuk Stimulus Ekonomi pada Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
- c. Penyelesaian pembayaran biaya salur atas penugasan PT Pos Indonesia melalui SKB Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Kepala BP BUMN, dan Kepala BPI Danantara tanggal 28 Oktober 2025 tentang Penugasan Khusus kepada PT Pos Indonesia untuk Penyaluran BLTS Kesra Tahun 2025

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik sebesar 15% atau mencapai 25% dari target Tahun 2025 sebesar 60% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Presentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik	%	15	15	100% (Memuaskan)

Realiasi penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik yang mencapai 100% dari target sebesar 15% yang terdiri dari antara lain sebagai berikut:

- a. Penugasan terkait pembangunan Huntara dan Huntap
- b. Penugasan terkait Pemberian diskon tarif transportasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
- c. Penugasan terkait penyaluran BLTS Kesra 2025

Selain, penugasan yang telah disebutkan di atas, pada TW I ini juga terdapat penambahan penugasan terkait dengan Program Stimulus Angkutan Lebaran 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2. Presentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi persiapan reimbursement diskon transportasi periode libur Nataru 2025/2026 oleh PT KAI, PT Pelni, dan PT ASDP	Terlaksana	Laporan hasil monitoring pelaksanaan stimulus ekonomi Diskon Tarif Kereta APi pada tanggal 13 Maret 2026
2	Koordinasi rencana pelaksanaan stimulus dikson transportasi periode HBKN Ramadhan dan Idulfetri tahun 2026 oleh PT KAI, PT Pelni, dan PT ASDP	Terlaksana	Pembuatan Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan imulus Ekonomi Diskon Tarif Kereta Api pada tanggal 13 Maret 2026 Pembuatan Penyampaian Draf Risalah Rakor Tindak Lanjut Persiapan Pelaksanaan imulus Ekonomi: Diskon Transportasi, Pembatasan Angkutan Barang Periode Lebaran Idul Fitri 1447 H/2026 M pada tanggal 4 Maret 2026

			Pembuatan Penyampaian Surat Menteri Pekerjaan Umum terkait Dukungan Diskon Tarif Tol pada Periode Hari Raya Idul Fitri 1447 H / 2026 M pada tanggal 12 Maret 2026
			Pembuatan Tindak Lanjut Usulan Tambahan imulus Diskon Transportasi Angkutan Laut Periode Idulfetri 2026 untuk Wilayah Papua pada tanggal 26 Februari 2026
			Pembuatan Tindak Lanjut Usulan Tambahan imulus Program Mudik Idulfetri Tahun 2026 untuk Wilayah Papua pada tanggal 17 Maret 2026
3	Koordinasi pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di daerah pascabencana oleh BUMN Karya	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Kunjungan Lapangan Rencana Pemulihan Pasca-Bencana Aceh pada tanggal 21 Januari 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pangan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 3 Maret 2026
			Pembuatan Laporan Perkembangan Pemulihan Ekonomi Pascabencana di Aceh pada tanggal 12 Februari 2026
			Pembuatan Laporan Perkembangan Pemulihan Ekonomi Pascabencana di Aceh pada tanggal 19 Januari 2026
4	Koordinasi penyelesaian pembayaran biaya salur penyaluran BLTS Kesra oleh PT Pos Indonesia	Terlaksana	Pembuatan Laporan Rapat Percepatan Reimbursement Biaya Salur BLTS Kesra Tahun 2025 tanggal 26

			Februari 2026 pada tanggal 2 Maret 2026
			Pengiriman surat/dokumen terkait Permohonan Dukungan Rapat Percepatan Reimbursement Biaya Salur BLTS Kesra pada tanggal 19 Februari 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yakni melalui efisiensi yang telah dilakukan secara terpusat di Lingkungan Kemenko Perekonomian sejak awal tahun. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan pendetailan dari penghematan yang dilakukan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat pendapat lain di media sosial terkait dengan kebijakan diskon transportasi dimana sejumlah Masyarakat menyampaikan bahwa lebih dibutuhkan diskon harga sembako ketimbang diskon transportasi;
2. Tantangan pemberian diskon tarif tol pada periode akhir libur sekolah di ruas tol Jakarta – Cikampek adalah pada penjelasan detail mengenai hitungan bisnis terkait insentif diskon ini kepada investor swasta terutama investor asing, karena 60% saham JLC ini dimiliki investor swasta. Para investor tidak mempermasalahkan adanya insentif diskon ini tetapi dikembalikan ke bisnis awal dan dalam PPJT tidak ada pasal mengenai diskon. Dalam hal ini, investor menghubungi Perusahaan menanyakan jangka waktu pemberian diskon tarif tol karena tidak disebutkan periode waktunya.
3. Permasalahan pada dasar hukum bagi BUMN untuk melakukan aksi korporasi berupa pemberian diskon tarif.
4. Masih kompleksnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/ rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Untuk melihat multiplier effect dari diskon tarif tol yang telah dijalankan selama ini, perlu mengecek apakah terdapat kenaikan pada data pariwisata sekitar yang terhubung jalan tol, salah satunya adalah kenaikan wisatawan yang berkunjung. Selain itu perlu juga melihat dampak perekonomian dari diberlakukannya diskon tarif tol selama ini kepada masyarakat sekitar;
2. Perlu melakukan kajian terkait diskon transportasi ini kaitannya dengan peningkatan perekonomian negara dan keuntungan bagi BUMN;

3. Pembuatan dasar hukum bagi BUMN yang akan melakukan pemberian tarif pada periode Nataru, yang ditandatangani oleh K/L terkait
4. Meningkatkan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.

2

Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya Skema Pembiayaan Inovatif

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Tersedianya Skema Pembiayaan Inovatif yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Presentase Realisasi Komitemen Pinjaman Daerah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Presentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah

Latar Belakang

Tujuan utama dari sasaran ini adalah untuk memperluas kapasitas fiskal daerah, mengurangi ketergantungan daerah pada transfer dari pusat, serta mempercepat realisasi program dan proyek pembangunan yang memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kesuksesan implementasi skema pembiayaan inovatif sangat bergantung pada komitmen dan kesiapan daerah, termasuk dalam mengakses skema pembiayaan tersebut, misalnya pinjaman daerah. Pinjaman, bila dikelola secara hati-hati dan berbasis pada analisis kelayakan yang matang, bukanlah beban melainkan investasi jangka panjang. Komitmen ini mencakup keberanian mengambil keputusan strategis, kesiapan tata Kelola proyek, serta sinergi lintas sektor yang solid.

Persentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah merupakan alat untuk mengukur efektivitas dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ketersediaan skema pembiayaan inovatif, khususnya melalui instrumen pinjaman daerah. IKU ini mencerminkan sejauh mana komitmen pinjaman yang telah disepakati dan direncanakan oleh Pemerintah Daerah benar-benar berhasil dicairkan dan dimanfaatkan untuk membiayai program serta kegiatan pembangunan. Adapun regulasi yang mendasari pelaksanaan pinjaman daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

IKU Persentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah dihitung dengan membandingkan jumlah Pemda yang telah menandatangani perjanjian pinjaman, dengan jumlah Pemda yang masuk ke dalam pipeline pinjaman daerah PT SMI Tahun 2026 yang jangka waktunya melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut

$$\% \text{ Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah} = \frac{(\text{Jumlah Pemda yang Menandatangani Perjanjian Pinjaman} \times 100\%)}{\text{Total Pemda dalam Pipeline Pinjaman Daerah PT SMI}}$$

Adapun pada pipeline pinjaman daerah PT SMI Tahun 2026, terdapat tiga (3) Pemerintah Daerah yang menyampaikan permohonan pinjaman daerah yang jangka waktunya melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah pelaksanaan komitmen sebesar Rp1 Triliun. Adapun target realisasi penyelesaian penugasan tersebut pada adalah sebesar 50% yang telah dicapai pada triwulan I, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Presentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah	%	0	0	100% (Memuaskan)

Mengingat panjangnya rangkaian tahapan yang dibutuhkan serta tingginya ketidakpastian *timeline* untuk dapat mencapai komitmen Pemerintah Daerah, maka target untuk IKU ini tidak dibuatkan target triwulanan.

Realisasi komitmen Pinjaman Daerah pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 50% dari total Pemda yang terdapat pada *Pipeline* Pinjaman Daerah PT SMI. Berdasarkan target tersebut, serta upaya sosialisasi, peningkatan kapasitas perangkat Pemerintah Daerah maupun *debottlenecking* isu-isu yang muncul, Keasdepan Infralog bersama para K/L terkait, berhasil mendorong beberapa komitmen pinjaman Daerah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar, dengan nilai sebesar Rp 765.48 Milyar pada 10 Februari 2026.

Sampai dengan periode TW I berakhir, belum ada Pemda yang gagal mengajukan Pinjaman Daerah.

Walaupun baru satu Pemda yang berhasil membuat komitmen, namun masih ada beberapa Pemda lain yang masih dalam tahap pengajuan Pinjaman Daerah dan masih berpeluang untuk disetujui di periode-periode selanjutnya di tahun ini. Kejadian ini muncul akibat memang masih dininya tahun 2026 dan kebutuhan waktu untuk mengajukan pinjaman serta memenuhi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Presentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi penyusunan	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Sosialisasi Penanganan

	program kerja dalam rangka percepatan penyaluran pinjaman daerah		Jalan Daerah Melalui Skema Pembiayaan Kreatif Dengan Optimalisasi Inpres No 11 Tahun 2025 terkait Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi pada tanggal 20 Februari 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Focus Group Discussion (FGD) – Finalization and Confirmation of Findings Demand Side Assessment of Subnational Borrowing pada tanggal 4 Maret 2026
			Menyelenggarakan Rapat Koordinasi SOP Link Pinjaman Daerah pada Tanggal 26 Februari 2026
			Pembuatan Penyampaian Notula dan Konsep Surat Pengantar Deputi terkait Rapat Koordinasi SOP Link Triwulan IV Tahun 2025 pada tanggal 18 Februari 2026
2	Monitoring dan evaluasi penyaluran dan pembayaran pinjaman daerah TW IV 2025	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Persiapan Sosialisasi REFINA pada tanggal 21 Januari 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pertimbangan 3 Menteri Refina pada tanggal 15 Januari 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Asistensi Tata Kelola Pemanfaatan Pinjaman Daerah dengan Tema “Pembiayaan Utang Daerah Dalam Rangka Infrastruktur dan Pelayanan Publik, serta Memperkuat Kemandirian Fiskal Daerah” pada tanggal 3 Februari 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yakni melalui efisiensi yang telah dilakukan secara terpusat di Lingkungan Kemenko Perekonomian sejak awal

tahun. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan pendetailan dari penghematan yang dilakukan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat kebijakan di beberapa *stakeholder* di lingkungan pusat bahwa untuk pinjaman yang diajukan melebihi periode masa jabatan kepala daerah, *underlying projects* harus merupakan aset yang dapat memberikan imbal balik secara langsung.
2. Pada pinjaman di sektor kesehatan, Pemda memiliki kesulitan untuk melakukan pengadaan alat kesehatan setelah rencana pembangunan fisik rumah sakit. Hal ini menjadi masalah untuk melakukan pinjaman daerah karena ketakutan infrastruktur yang dibangun tidak dapat dimanfaatkan karena belum tersedianya alkes di Rumah Sakit tersebut

Di Sektor jalan, Pemerintah juga dapat mendorong pelaksanaan pinjaman daerah melalui sinergi program pinjaman daerah dengan program inpres jalan. Skema ini menekankan pada peran insentif program inpres jalan bagi Pemda yang telah melakukan penerbitan pinjaman daerah. Hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi Pemda untuk melakukan pinjaman daerah. Namun, program ini perlu koordinasi lebih lanjut di lingkungan Pemerintah Pusat terlebih dahulu

3. Masih kompleksnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait, khususnya K/L di Sektor Teknis

Berdasarkan kendala–kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan menekankan pentingnya pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan inovatif daerah, terlepas dari kemampuan suatu proyek untuk memberikan hasil imbal balik. Selain itu, poin lain yang juga menjadi perhatian adalah kemungkinan untuk menyesuaikan periode pinjaman dengan masa umur aset infrastruktur yang dibangun
2. Melakukan koordinasi terkait dengan penyinergian program pinjaman daerah dengan program Pemerintah lainnya untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan pinjaman daerah serta memberikan insentif Pemda untuk melakukan pinjaman daerah
3. Meningkatkan sinergi antar K/L dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik, dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda

Latar Belakang

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputy Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik berperan penting dalam pelaksanaan sasaran strategis yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui:

- Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional;
- Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional;
- Pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional;
- Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, di bidang;
 1. Pengembangan BUMN di sektor Infrastruktur
 2. Pengembangan BUMN di sektor Logistik
 3. Inovasi pembiayaan daerah dan kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy. Sasaran strategis ini merupakan bagian dari perspektif internal business process yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif stakeholder, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN Infrastruktur dan Logistik yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Adapun nilai dari persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Infrastruktur dan Logistik dalam mendukung integrasi transportasi multimoda untuk logistik dan integrasi transportasi multimoda berbasis kawasan *Transit Oriented Development* (TOD).

% efektivitas SKP=Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda sebesar 80%. Adapun target realisasi penyelesaian penugasan tersebut pada adalah sebesar 20% pada triwulan I, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda	%	20	20	100% (Memuaskan)

Realiasi Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda mencapai 20% dari target sebesar 20% sampai dengan laporan ini disusun.

Realisasi ini didukung oleh serangkaian upaya koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendukung kebijakan dan implementasi integrasi multimoda oleh yang dilaksanakan oleh BUMN di bidang logistik.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi dan koordinasi penyelesaian isu strategis pengembangan TOD	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Koordinasi Percepatan Operasional asiun Pondok Cina Baru di TOD Samea Mahata Margonda dan Connecting Bridge TOD Samea Mahata Serpong di Kantor Marketing Gallery Samea Mahata Margonda pada tanggal 24 Februari 2026
			Pembuatan surat/dokumen terkait Notula Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian dan Operasional TOD Samea Mahata Margonda dan TOD Samea Mahata Serpong pada tanggal 1 Maret 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional Menjelang dan Saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Puasa dan Idul Fitri pada tanggal 18 Februari 2026
2	Koordinasi optimalisasi	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Kunjungan Kerja KCIC

	integrasi transportasi intermoda dan multimoda internasional		terkait Proses EMU Maintenance dan Proses Operating Control Center pada tanggal 19 Februari 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Kunjungan Kerja Pengembangan dan Pembangunan MRT Jakarta pada tanggal 18 Februari 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Kunjungan kerja terkait multimoda di Pelindo Belawan pada tanggal 26 Februari 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yakni melalui efisiensi yang telah dilakukan secara terpusat di Lingkungan Kemenko Perekonomian sejak awal tahun. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan pendetailan dari penghematan yang dilakukan

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat isu pada pelaksanaan substansi dalam perjanjian antara KAI dan Perumnas pada TOD Margonda. Sedangkan, isu lain yang muncul adalah isu terkait dengan masalah hukum pada TOD Tanjung Barat. Kemenko Perekonomian cukup sulit untuk masuk ke dalam kesepakatan kedua BUMN ini selain mendorong percepatan penyelesaian yang dilakukan
2. Terdapat permasalahan anggaran pada pembangunan TOD akibat adanya pergeseran fokus pembangunan Pemerintah, yang tidak lagi mengarah pada pembangunan infrastruktur secara masif.
3. Pelaksanaan pengiriman logistik haji 2026 memerlukan penguatan koordinasi antar-BUMN untuk memastikan kesiapan kapasitas kargo, kelancaran distribusi, dan ketepatan waktu pengiriman.
4. Pelaksanaan integrasi logistik multimoda di Belawan masih menghadapi kendala pada aspek struktur biaya, fleksibilitas tarif, dan komitmen operasional, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing layanan logistik multimoda.

Berdasarkan kendala–kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mendorong percepatan penyelesaian kesepakatan-kesepakatan yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek TOD Perumnas secara penuh
2. Mengidentifikasi permasalahan utama pembiayaan perumahan, khususnya TOD, untuk dapat berkontribusi pada kesuksesan program 3 juta rumah.
3. Perbaikan difokuskan pada penguatan sinergi PT Garuda Indonesia dan PT Pos Indonesia, optimalisasi kapasitas kargo, serta penyediaan skema layanan dan harga khusus guna mendukung kelancaran pengiriman logistik haji.
4. Perbaikan difokuskan pada standardisasi tarif, optimalisasi insentif logistik multimoda, serta replikasi dukungan sinergi BUMN dalam penyediaan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi dan daya saing layanan.

3.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah	Latar Belakang Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputy Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik berperan penting dalam pelaksanaan sasaran strategis yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui: • Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional; • Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional; • Pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional; • Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, di bidang; 1. Pengembangan BUMN di sektor Infrastruktur 2. Pengembangan BUMN di sektor Logistik 3. Inovasi pembiayaan daerah dan kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik; dan • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy. Sasaran strategis ini merupakan bagian dari perspektif internal business process yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif stakeholder, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN Infrastruktur dan Logistik yang
--	---

berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka mendorong penguatan kerja sama antardaerah/(KAD), khususnya yang bertujuan mendukung pengembangan infrastruktur dan efisiensi sistem logistik daerah.

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerjasama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah

% efektivitas SKP

$$= \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah sebesar 80%. Adapun target realisasi penyelesaian penugasan tersebut pada adalah sebesar 20% pada triwulan I, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah	%	20	20	100% (Memuaskan)

Realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah mencapai 20% dari target 20% sampai laporan ini disusun.

Pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan penjajakan, fasilitasi, dan implementasi awal Kerja Sama Antar Daerah (KAD) melalui sinergi BUMN Logistik, meliputi pelaksanaan KAD B2B bersama Rumah Tani Nusantara dan PT Pos Indonesia di wilayah Sumatera, penjajakan KAD Solo dengan dukungan KA Logistik, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mendukung kelancaran distribusi pangan dan pengendalian inflasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi pengembangan sistem logistik paska bencana	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Koordinasi Efisiensi Data Logiik Nasional pada tanggal 12 Maret 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Diskusi Optimalisasi Peran BUMN Logiik untuk Implementasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan persiapan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 pada tanggal 1 Maret 2026
			Menyelenggarakan Und Rapat Persiapan GNPIP pada Tanggal3 Februari 2026
			Pengiriman surat/dokumen terkait Diskusi Tindak Lanjut Implementasi KAD dan Persiapan GPIPS 2026 pada tanggal 23 Februari 2026

2.	Koordinasi implementasi KAD wilayah Sumatera	Terlaksana	Menyelenggarakan Rakor Persiapan GNPIP Wilayah Sumatera pada Tanggal 29 Januari 2026
			Pembuatan Laporan Rencana KAD B2B Rumah Tani Nusantara dengan Dukungan Logistik PT Pos Indonesia untuk Kegiatan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 pada tanggal 9 Februari 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yakni melalui efisiensi yang telah dilakukan secara terpusat di Lingkungan Kemenko Perekonomian sejak awal tahun. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan pendetailan dari penghematan yang dilakukan

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum tersedianya data rantai pasok yang terintegrasi, meliputi data *supply*, *demand*, produsen, distributor, dan volume distribusi sebagai dasar pelaksanaan KAD.
2. Komitmen pelaksanaan KAD antar-pemangku kepentingan, termasuk kepastian volume distribusi dan peran *offtaker*, belum optimal.
3. Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan KAD antar pemerintah daerah, BUMN Logistik, dan pelaku usaha masih perlu diperkuat agar pelaksanaan berjalan berkelanjutan.

Berdasarkan kendala–kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mempercepat penyusunan dokumen kerja sama (MoU dan PKS) serta memperjelas peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KAD.
2. Mengembangkan basis data rantai pasok dan melakukan *business matching* untuk meningkatkan kepastian pasokan, permintaan, dan distribusi pangan.

	3. Mengoptimalkan sinergi BUMN Logistik, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam distribusi pangan, pemantauan pelaksanaan, serta efisiensi biaya logistik.
3.3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah	Latar Belakang Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputy Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik berperan penting dalam pelaksanaan sasaran strategis yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui: • Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional; • Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional; • Pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional; • Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, di bidang; 1. Pengembangan BUMN di sektor Infrastruktur 2. Pengembangan BUMN di sektor Logistik 3. Inovasi pembiayaan daerah dan kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik; dan • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy. Sasaran strategis ini merupakan bagian dari perspektif internal business process yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif stakeholder, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN Infrastruktur dan Logistik yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang mendukung inovasi pembiayaan daerah, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk pembangunan infrastruktur. Proses tersebut dinilai efektif apabila kebijakan disusun melalui tata kelola yang baik (transparan, partisipatif, berbasis bukti), ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga terkait lainnya, serta hasil pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi melalui laporan yang terstruktur.

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Inovasi Pembiayaan Daerah

% efektivitas SKP

$$= \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} \\ + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah sebesar 80%. Adapun target realisasi penyelesaian penugasan tersebut pada adalah sebesar 20% pada triwulan I, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah	%	20	20	100% (Memuaskan)

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah yang mencapai target merupakan hasil koordinasi yang era tantara berbagai stakeholders dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi pembiayaan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD maupun transfer pusat.

Realisasi triwulan I didorong oleh kuatnya minat pemerintah daerah dalam mengeksplor opsi-opsi alternatif dalam memenuhi gap kebutuhan daerah berupa pembiayaan infrastruktur yang tidak dapat dibiayai oleh APBN maupun APBD. Selain itu, donor-donor erat bekerja sama dengan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Infrastruktur dan Logistik dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dalam menjalani berbagai proses yang dibutuhkan tidak hanya dalam rangka penerbitan Obligasi maupun Sukuk Daerah dalam rangka

pembangunan infrastruktur daerah, namun juga pelaksanaan KPBU untuk Daerah, serta potensi pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan inovatif lainnya

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi pendampingan persiapan penerbitan Sukda Sumbar untuk indentifikasi calon project potensial, serta koordinasi lembaga donor untuk pendampingan persiapan penerbitan obda/sukda	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Consultation Mission Tahap 2 Asian Development Bank (ADB) pada tanggal 19 Februari 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Pembahasan Implementasi Skema Pembiayaan Kreatif dalam Pembangunan Proyek Infraruktur pada tanggal 12 Maret 2026
			Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penerbitan Sukuk Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tanggal 24 Februari 2026
			Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan Penerbitan Sukuk Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tanggal 9 Januari 2026
2	Identifikasi awal kebutuhan penerbitan	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Tindak

		obligasi daerah DKI Jakarta		Lanjut Persiapan Penerbitan Sukuk Daerah di Provinsi Sumatera Barat dan Obligasi Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Maret 2026
				Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Inisiasi Penerbitan Obligasi Daerah DKI Jakarta pada Tanggal 20 Februari 2026
				Pembuatan Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan Penerbitan Sukuk Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Inisiasi Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Maret 2026
	3	Identifikasi kendala persiapan pembentukan Dana Abadi Daerah pada beberapa daerah yang sudah berjalan di tahun 2025, serta secara khusus, koordinasi awal kebutuhan pendampingan untuk persiapan pembentukan DAD Kab. Badung	Terlaksana	Menyelenggarakan Rapat Teknis Update Progress Implementasi Dana Abadi Daerah pada Tanggal 27 Januari 2026
	4	Identifikasi proyek KPBU Quick Win 2026	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan koordinasi dan peninjauan lapangan terkait Pembangunan Proyek KPBU RSID Wangaya di RSUD Wangaya, Denpasar, dan Pembangunan Proyek APJ Kota Denpasar pada tanggal 4 Maret 2026
				Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Koordinasi terkait Penanganan Pengaduan Tunggalan Availability Payment (AP) Proyek KPDBU APJ Pemerintah

			Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 6 Maret 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Diskusi dalam rangka Koordinasi KPBU untuk Proyek Infraruktur di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Februari 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Kick-Off Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Akademik terkait pengembangan skema pembiayaan proyek perumahan termasuk pengembangan skema KPBU sektor perumahan sebagai tindak lanjut hasil kajian Skema Build to Order (BtO) pada tanggal 1 Maret 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Bersama KPBU pada tanggal 20 Februari 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Pertemuan dengan Asian Development Bank (ADB) Public Private Partnership Monitor 2026 pada tanggal 5 Maret 2026
			Menyelenggarakan Kunjungan dalam rangka Koordinasi KPBU untuk Proyek Infraruktur di Provinsi Jawa Barat pada Tanggal 3 Februari 2026
			Pembuatan Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Penanganan Jalan Daerah melalui Skema Pembiayaan Kreatif pada tanggal 9 Februari 2026

			Pembuatan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Proyek Quickwin KPBU 2026 pada tanggal 12 Maret 2026
			Pengiriman surat/dokumen terkait Koordinasi KPBU untuk Proyek Infrastuktur di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Februari 2026
Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yakni melalui efisiensi yang telah dilakukan secara terpusat di Lingkungan Kemenko Perekonomian sejak awal tahun. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan pendetailan dari penghematan yang dilakukan. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut: 1. Skema-skema pembiayaan inovatif seringkali membutuhkan anggaran baru yang membuat hal ini perlu perencanaan yang cukup baik, ataupun perubahan. Hal ini menimbulkan kurangnya fleksibilitas Pemda untuk secara cepat menerapkan skema-skema inovatif tersebut 2. Pemda masih membutuhkan pemahaman terkait hutang Daerah, baik dari sisi implikasi, pemanfaatan serta pengelolaannya. 3. Minat Pemda kepada skema KPBU relatif menurun dari periode-periode sebelumnya. Hal ini nampak dari jumlah Proyek yang menurun secara signifikan. Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai: 1. Melakukan sosialisasi kepada Pemda-Pemda yang tertarik untuk melakukan pembiayaan inovatif, untuk dapat menyiapkan tidak hanya persyaratan-persyaratan teknis, namun juga anggaran untuk hal-hal yang dibutuhkan 2. Mendorong penyempurnaan adaptasi skema KPBU untuk lebih dapat memudahkan penggunaan skema KPBU oleh Pemda-Pemda secara lebih luas, khususnya terkait dengan penurunan nilai modal penyiapan dari Proyek KPBU.			

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**4.1. Presentase Indeks
Kepuasan Layanan
Sinkronisasi,
Koordinasi, dan
Pengendalian
Kebijakan di Bidang
Pengembangan
Badan Usaha Milik
Negara Bidang
Infrastruktur dan
Logistik**

Latar Belakang

Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik yang mencakup: (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan BUMN bidang infrastruktur dan logistik, (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang pengembangan BUMN bidang infrastruktur dan logistik, (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang BUMN bidang infrastruktur dan logistik, (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Bidang Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/ Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri atas 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata Jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah item Survey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik. Adapun target realisasi tingkat kepuasan tersebut adalah 3 dari 4 yang telah dicapai pada triwulan I, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik	indeks	-	-	100% (Memuaskan)

Presentase Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik dilakukan melalui penyebaran survey kepada *stakeholders* terkait yang secara intens berkoordinasi dengan unit Keasdepan Pengembangan BUMN Infrastruktur dan Logistik selama triwulan I tahun 2026.

Realisasi triwulan I dicapai dengan mendorong sebanyak 20 responden yang mewakili *stakeholders* terkait yang berkoordinasi dengan unit Keasdepan Pengembangan BUMN Infrastruktur dan Logistik selama triwulan I tahun 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Presentase Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Persiapan survei kepuasan layanan Semester I 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan persiapan survey kepuasan layanan koordinasi dan sinkornisasi kepada Koresponden terkait

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh

implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan survei secara daring tidak membutuhkan anggaran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu masih kompleksnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait.

Berdasarkan kendala–kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu meningkatkan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Indeks Persentase

Pelaksanaan

Rencana Aksi RB

Asisten Deputi

Bidang

Pengembangan

Badan Usaha Milik

Negara Bidang

Infrastruktur dan

Logistik

Latar Belakang

Terwujudnya tata kelola Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik yang baik merupakan sasaran strategis yang berfokus pada perspektif learning and growth dan merupakan turunan dari sasaran strategis perspektif learning and growth level ke deputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Infrastruktur dan Logistik dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Infrastruktur dan Logistik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Infrastruktur dan Logistik:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Infrastruktur dan Logistik sebesar 92%. Adapun target realisasi tingkat kepuasan tersebut adalah 20% yang telah dicapai pada triwulan I, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

IKU-5.1 Persentase pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	%	15%	15%	100% (Memuaskan)
---	---	-----	-----	------------------

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

5.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Infrastruktur dan Logistik			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan Rencana Aksi, Manual IKU serta penandatanganan Perjanjian Kinerja pada Januari 2026
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I	Terlaksana	Telah disusun pada kuartal ke-2.
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Seluruh administrasi persuratan telah dilakukan melalui SRIKANDI

Pelaksanaan keseluruhan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yakni melalui efisiensi yang dilakukan secara terpusat di Lingkungan Kemenko Perekonomian sejak awal tahun. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan pendetailan dari penghematan yang dilakukan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Deadline penyelesaian Lapkin yang cukup mepet dengan waktu berakhirnya periode
2. Realibilitas Srikandi pada *peak hour* yang cukup kurang

Berdasarkan kendala–kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan persiapan secara jauh-jauh hari, mendorong Kesesdepan untuk meminta data sesuai dengan *timeline* penyelesaian dokumen Lapkin.
2. Mengajukan penambahan kuota byte aplikasi.

Jakarta, 2 April 2026

**Asisten Deputi Pengembangan BUMN
Bidang Infrastruktur dan Logistik**

Yuli Sri Wilanti

